

**DAMPAK PNPB-MP TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA
KELOMPOK MASYARAKAT
(Studi Kasus: Peserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
Pengguna dana bergulir di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan
Kuranji, Kota Padang)**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas**

Oleh

LOLA OKTAVIA

BP : 06 192 020



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

DAMPAK PNPM-MP TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT

(Studi Kasus: Peserta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengguna Dana Bergulir di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang)

Lola Oktavia. 2011, “Dampak Program PNPM-MP Terhadap Pengembangan Usaha Kelompok masyarakat (Studi Kasus: Peserta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang)”. Skripsi. Jurusan Antropologi Sosial Universitas Andalas.

Masalah kemiskinan di perkotaan seperti di kelurahan Sungai Sapih merupakan salah satu yang perlu di tangani program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan di perkotaan yaitu PNPM-MP. Dimana dalam pelaksanaan PNPM-MP tersebut masyarakat (khususnya masyarakat miskin) dihimpun ke dalam kelompok – kelompok yang disebut dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) guna mendapatkan dana pinjaman bergulir dan pelatihan teknis kewirausahaan melalui suatu wadah yang disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dengan bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, yang pada gilirannya berhasil memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan sehingga keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari dan juga kewajiban untuk mengembalikan angsuran modalnya. Dengan kata lain bahwa dengan PNPM-MP yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal dapat membentuk masyarakat yang mampu mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapinya secara berkelanjutan. Bertolak dari hal tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pandangan peserta KSM terhadap proses pelaksanaan pengembangan usaha kelompok masyarakat melalui program PNPM- MP?. 2) Bagaimana dampak program PNPM-MP terhadap pengembangan usaha kelompok masyarakat dalam peningkatan ekonomi rumah tangga mereka?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Langkah awal dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi (pengamatan) kemudian melakukan pengenalan dengan pengurus LKM dan peserta KSM. Setelah penulis mengenal dan melakukan wawancara dengan informan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuatpencandraan (deskripsi) secara sistematis mengenai proses pelaksanaan program bagi keluarga miskin, implementasi program dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya program simpan pinjam dana bergulir di Kelurahan Sungai Sapih masih belum optimal. Pandangan peserta KSM pemanfaat pinjaman dapat dikatakan sangat membantu dalam pengembangan usaha jika memang dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan rencana dan tujuan awal dari ketentuan program. Namun, masih ditemukan adanya penyimpangan pemanfaatan dana yang mengakibatkan tidak mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari program ini terutama bagi ekonomi peserta KSM masih jauh dari pencapaian, guna untuk memberdayakan masyarakat khususnya RTM masih belum efektif, ini dikarenakan keterlibatan RTM di Kelurahan Sungai Sapih belum sepenuhnya. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman prosedur program, sasaran yang tidak efektif dapat dikatakan bahwa banyak peserta KSM sebagai pemanfaat pinjaman merupakan keluarga tidak sesuai dengan kriteria RTM dan kurangnya komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terus dikembangkan. Hal ini agar pembangunan dapat menyentuh masyarakat, baik di desa maupun di kota secara merata. Namun di samping itu perlu lagi diperhatikan efektivitas dan efisien dari suatu program pemerintah terhadap kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Upaya ini tidak serta merta menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi masyarakat sebagai ikon pembangunan turut serta bekerjasama demi tercapainya apa yang diinginkan, mencakup pembangunan yang bertujuan untuk pengembangan usaha kecil yang mereka kelola dalam lingkup keluarga.

Dalam hal ini masyarakat miskin adalah sasaran utama dalam pembangunan. Untuk memerangi kemiskinan adalah mengembangkan usaha. Bukan saja pelaku usaha dapat meningkatkan pendapatan, namun juga akan membuka kesempatan kerja yang luas bagi orang lain. Dalam tata kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan memerangi kemiskinan tidak hanya sekedar membagi uang tanpa kerja dan produksi (atau bagi warga miskin yang masih potensial tetapi hanya sekedar mengharap bantuan) tidak memiliki dampak pertumbuhan ekonomi apapun.

Berdasarkan data Susenas Panel Maret 2009 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat berjumlah sebanyak 429.250 jiwa. Dari tahun 2005 hingga tahun 2009, perkembangan jumlah penduduk miskin ini cukup berfluktuasi. Pada periode 2005 – 2006 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 482.800 jiwa menjadi 578.726 jiwa pada tahun 2006. Namun pada periode-periode selanjutnya, yakni dari tahun 2006 hingga tahun 2009 terjadi perkembangan yang cukup baik dengan turunnya jumlah penduduk miskin sepanjang periode tersebut (BPS Sumatera Barat, 2009).

Dilihat menurut wilayah, sebagian besar penduduk miskin adalah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 2005 persentase penduduk kota yang miskin lebih besar dibandingkan persentase penduduk desa yang miskin. Namun pada periode 2006 hingga 2009 terjadi sebaliknya, persentase penduduk desa yang miskin lebih besar dibandingkan persentase penduduk kota yang miskin. Selanjutnya jika dilihat dari total penduduk miskin, pada tahun 2009 sebanyak 73,03 persen penduduk miskin adalah penduduk pedesaan, dan sisanya sebanyak 26,97 persen penduduk miskin terdapat di daerah perkotaan (BPS Provinsi Sumbar, 2009).

Salah satu upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dalam pembangunan khususnya bagi masyarakat miskin dibentuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial kapital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana lembaga keswadayaan masyarakat (LKM)/ unit pengelolaan keuangan (UPK) berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan

kegiatan pinjaman bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat ([http:// pnpm mandiri. Org](http://pnpmmandiri.org), 2010).

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan (PNPM MP) ([http:// pnpm mandiri.org](http://pnpmmandiri.org), 2010).

Sasaran PNPM-MP adalah penduduk miskin yang tinggal di kelurahan, maka untuk menyelenggarakan program ini pemerintah mendirikan suatu badan yang berfungsi untuk mendampingi masyarakat kelurahan dalam melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan sesuai dengan siklus perkembangan yakni Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Di dalam LKM ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang terdapat di dalam LKM. Partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjadi perencana, dan pelaksana program-program yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Untuk melaksanakan program tersebut yang merupakan dana dari pemerintah, masyarakat harus mengajukan proposal ke pengurus LKM untuk mendapatkan dana itu. Proposal berisi tentang pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti program infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pemberian dana simpan pinjam, beasiswa dan lainnya.

Salah satu kelurahan yang memiliki banyak warga miskin adalah kelurahan Sungai Sapih, program ini berjalan dengan baik dalam bentuk simpan-pinjam karena pada kenyataan di kecamatan kurangi, satu-satunya yang masih berjalan simpan-pinjam adalah kelurahan ini. hal ini mendorong peneliti untuk menggambarkan proses pelaksanaan dari program tersebut.

Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka (khususnya usaha kecil) sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Pembangunan daerah juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri dan percaya diri.

Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membantu kemandirian dan pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pinjaman bergulir yang digunakan masyarakat Sungai Sapih adalah salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, PNPM MP bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM MP hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

Bagi masyarakat Sungai Sapih, PNPM MP telah ada sejak awal tahun 2008. Masyarakat mengenal program ini dari kelurahan setempat. Dua bulan akhir tahun 2008 tepatnya pada tanggal 24 november, masyarakat membentuk kelompok usaha kecil yang di beri nama kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Pada pelaksanaan dana pinjaman di Kelurahan Sungai Sapih peserta yang menjadi pemanfaat dana pinjaman bergulir ini telah melalui tahap 3 dalam memperoleh pinjaman bergulir yang di gulirkan kepada masyarakat miskin yang berbeda. KSM peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/ UPK. Dengan kata lain, KSM peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Hartati S.E selaku bendahara UPK pada tanggal 14 april 2011, yang mengatakan bahwa di dalam pelaksanaannya, program ini dapat dikatakan berhasil jika tingkat pengembalian pinjaman dari kelompok dan peserta yang cukup tinggi dan pencapaian tingkat pengembalian 96% dari kelurahan Sungai Sapih. Di dalam pelaksanaannya pada tahun 2008, kelompok swadaya masyarakat yang didanai dari dana pinjaman ini adalah sebanyak 10 KSM berjumlah 70 orang , pada tahun 2009 memiliki 2 KSM berjumlah 17 orang dan tahun 2010 memiliki 2 KSM berjumlah 17 orang. Jumlah pinjaman dan persentasi pengembalian pinjaman sebagai berikut:

Tabel 1.1 Laporan Alokasi Dana Pinjaman KSM

No	Tahun	Tahapan Pinjaman	Alokasi Pinjaman	Persentasi Pengembalian

1.	2008	Golongan I	RP 35.000.000,-	100%
2.	2009	Golongan II	RP 50.000.000,-	97%
3.	2010	Golongan III	RP 75.000.000,-	98%

Sumber: UPK Kelurahan Sungai Sapih

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua kelompok yang dapat mengembalikan dana pinjaman bergulir seutuhnya.

Pelaksanaan kegiatan simpan-pinjam di kelurahan Sungai Sapih dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun belum dapat dilihat sejauhmana kegiatan program ini berdampak terhadap rumah tangga miskin dalam pengembangan usaha demi peningkatan ekonomi keluarga mereka secara mandiri. Sesuai hal tersebut maka penelitian ini diberi judul ” *Dampak PNPM-MP Terhadap Pengembangan Usaha Kelompok*”.

B. Perumusan Masalah

Pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Dalam hal ini PNPM-MP merupakan suatu program pemerintah yang bersifat pemberdayaan masyarakat karena dalam proses kegiatan program masyarakat yang bersifat subjek/ pelaku pembangunan. Mandiri perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat mengorganisasikan dirinya dari mulai menemukan masalah / kebutuhan, bagaimana merencanakan pemecahan masalah, menyusun program, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Di samping itu PNPM MP berfungsi sebagai salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk modal usaha mereka. Upaya pemerintah dalam

pembangunan, baik di desa maupun di kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat. PNPM-MP dalam penanggulangan kemiskinan memanfaatkan sebagian dana BLM (bantuan langsung masyarakat) untuk kegiatan pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan menumbuhkan kesadaran, kemauan, tanggungjawab dan rasa kebersamaan.

Program PNPM MP berupa pinjaman sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil/ bagi pemula dalam usahanya merupakan salah satu kebijaksanaan moneter yang penting, karena hal tersebut secara langsung dengan dinamika investasi di berbagai sektor ekonomi. Bank Indonesia telah memperkenalkan berbagai bentuk pengkreditan untuk masyarakat lapisan bawah dengan maksud agar lapisan bawah memperoleh akses yang memadai terhadap sumber dana yang ada.

Kebijakan yang digariskan bank Indonesia untuk mengembangkan usaha kecil seperti yang ditunjukkan dalam instrumen pengkreditan, tidak saja untuk memberi kredit yang diperlukan, tapi juga membantu masalah-masalah lain yang sangat terkait. Seperti alternatif jaminan kredit, pengembang kelompok, bantuan pemasaran, latihan bimbingan teknis dan pengembangan sumber daya manusia secara umum.

Bagi masyarakat Sungai Sapih PNPM-MP telah dirasakan oleh warga ini tidak hanya bantuan yang berdasarkan hanya memberikan bantuan untuk pembangunan fisik tetapi juga pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya. Berupa pengkreditan untuk modal usaha yang menciptakan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dana bergulir ini diperuntukkan bagi warga miskin, dan sejalan dengan pelaksanaan program ini, dalam penelitian ini melihat apakah pelaksanaan program ini sesuai dengan sasaran yang ditentukan oleh aturan program itu. Dari pengamatan ditemui, anggota yang

tergabung menjadi peserta dalam KSM melaksanakan usaha ekonomi produktif yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif ini menimbulkan suatu proses sosial, dan proses sosial yang terjadi ini menimbulkan dampak terhadap perkembangan dan hasil usaha kelompok di kecamatan Kuranji ini. Usaha tadi dikembangkan bagi masing-masing individu yang ingin membuat atau baru memulai usaha dan ada juga usaha untuk kelompok, dan sebagian besar anggotanya berhasil mengembalikan dana pinjaman tepat waktu, sehingga bisa dikatakan kegiatan dari KSM di daerah ini berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis perlu membandingkan tingkat kesejahteraan antara masyarakat penerima bantuan pinjaman bergulir PNPM Mandiri baik sebelum maupun sesudah pinjaman guna melihat apakah ada perbedaan tingkat kemajuan usaha setelah adanya program bantuan dari pemerintah. Hal ini dirasakan perlu untuk melihat apakah diperlukan perbaikan kebijakan dari pemerintah kepada para peminjam yang notabene memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, misalnya diperlukan perbaikan program agar masyarakat mampu memanfaatkan pinjaman secara lebih optimal.

Sebagaimana dari uraian di atas penulis ingin melihat:

1. Bagaimana pandangan peserta KSM terhadap proses pelaksanaan pengembangan usaha kelompok masyarakat melalui program PNPM- MP?
2. Bagaimana dampak program PNPM-MP terhadap pengembangan usaha kelompok masyarakat dalam peningkatan ekonomi rumah tangga mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan peserta KSM terhadap proses pelaksanaan pengembangan usaha kelompok masyarakat melalui program PNPM MP
2. Mendeskripsikan dampak program PNPM-MP terhadap pengembangan usaha kelompok masyarakat dalam peningkatan ekonomi rumah tangga mereka.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis. Peneliti berharap penelitian ini akan bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang akan meneliti mengenai PNPM mandiri dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita dalam hal kehidupan masyarakat yang hidup dalam taraf ekonomi yang relatif lemah
- b. Manfaat praktis. Penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman terhadap proses pelaksanaan dan dampaknya bagi peningkatan ekonomi rumah tangga.
- c. Manfaat teknis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan metode untuk penelitian lain yang ada hubungannya dengan PNPM-MP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pandangan peserta dan mendeskripsikan dampak serta mengidentifikasi kendala PNPM Mandiri perkotaan, khususnya program pinjaman dana bergulir untuk kelompok bagi keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kemandirian. Program dana bergulir dalam mengembangkan usaha rumah tangga miskin merupakan salah satu usaha pembangunan yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Sapih.

Pandangan peserta KSM pada program pinjaman modal ini banyak peserta merasa terbantu dengan adanya modal dana ini karena dapat membantu mereka dalam membutuhkan modal usaha dan juga mendorong peningkatan pendapatan didalam keluarga. Namun, tidak menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat karena belum dapat dilihat dengan pemberian bantuan modal saja tapi juga dilihat pelaksanaan dari program yang menjadi dasar keberhasilan tujuan. Dampak PNPM Mandiri perkotaan, khusus program pinjaman modal di Kelurahan Sungai Sapih secara umum belum mampu dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan program pinjaman bergulir yang dilaksanakan belum tepat sasaran meskipun telah tepat tujuan. Sedangkan, tolak ukur dampak yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran dan tujuan dari program. Apabila program tersebut telah tepat tujuan namun belum mencapai secara maksimal yaitu telah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian kepada peserta dengan juga bertambahnya pendapatan, serta belum tepat sasaran secara keseluruhan RTM. Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan karena ternyata masih ditemukan di lapangan bahwa pemanfaat dana bergulir tersebut bukan mereka dikategorikan keluarga miskin hal ini disebabkan petugas menentukan sendiri peserta-peserta

yang mendapatkan pinjaman ini. Secara keseluruhan jumlah RTM di Kelurahan Sungai Sapih sekitar 1.191 KK yang menjadi sasaran atau penerima manfaat masih sebanyak 104 rumah tangga. Selanjutnya, suatu program dapat dikatakan efektif apabila dalam pemanfaatan prasarana dan sarana termasuk dana digunakan sesuai dengan tujuan awal, serta program tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku dan sasarannya. Dalam operasional program masih ditemukan penerima manfaat yang menggunakan dana pinjaman modal usaha tidak sesuai dengan tujuan yang ada di proposal, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi yang sedang atau yang akan dijalankan. Di samping itu, ada juga peserta yang memanfaatkan pinjaman ini untuk mengembangkan usaha yang mereka lakukan dalam hal peningkatan kebutuhan yang diperlukan untuk usaha, sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Pelaksanaan dan pengelolaan program dana pinjaman modal di Kelurahan Sungai Sapih cukup berjalan dengan baik meskipun dalam perjalanannya masih ditemukan kendala-kendala. Peneliti disini mendeskripsikan *pertama*, kendala dari pelaksana antara lain adanya pengurus-pengurus LKM yang bersikap enggan untuk bersikap transparan dalam menjalankan program, serta lemahnya monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Kendala lainnya terbatasnya jumlah aparat pemerintahan yang diterjunkan untuk menangani program pengetasan kemiskinan tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang ditangani dengan jumlah petugas yang diterjunkan. Kendala lainnya adalah masih banyak terjadi kesalahpahaman diantara petugas pelaksana program, tentang prosedur pelaksanaan. *Kedua*, kendala dari objek program yaitu masih didapatkan peserta bukan berasal dari keluarga miskin dan ditemukan adanya penyimpangan pada pinjaman modal yang tidak digunakan untuk usaha. Serta terdapatnya peserta dalam pengembalian pinjaman modal mengalami tunggakan meskipun tidak berpengaruh besar terhadap program karena

masih dapat diatasi dengan peserta tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar meskipun sudah lewat pada batas yang telah ditetapkan untuk angsuran tersebut.

B. Saran

Keberadaan PNPM Mandiri perkotaan, khususnya program pinjaman modal untuk usaha di Kelurahan Sungai Sapih secara umum sudah dikatakan berjalan dengan baik meskipun masih belum mampu untuk dikatakan efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Dalam program ini terutama dana bergulir di kelurahan Sungai Sapih ini diharapkan pengurus LKM SSP lebih transparan dalam setiap kegiatan dan modal dana bergulir tersebut benar-benar masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan hidup
2. Bagi pengurus LKM setempat agar menjadi mediator yang dapat menjadi pembawa perubahan yang baik dan bisa dipercaya serta memegang teguh kejujuran dan keadilan
3. Diperlukan langkah-langkah pendekatan yang persuasif kepada masyarakat untuk mensosialisasikan program-program pembangunan, agar masyarakat dapat menerimanya tanpa merasa curiga.
4. Bagi pihak terkait, untuk dapat memonitoring setiap perkembangan usaha peserta agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pinjaman bergulir.
5. Perlu menjaga hubungan komunikasi yang baik antara pengurus dengan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: PT. Bina Aksara,
- _____, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2009. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat
- Bogdan dan Tylor, 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional
- Bogdan, Robert C. 1972. *Participant Observation In organizational Settings*. Syracuse N.Y : Syracuse University Press
- Bustanuddin Agus, 2006. *Islam dan Ekonomi*. Padang: Andalas University Press
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008. *Modul PNPM MP*. Direktorat Jendral Cipta Karya
- Effendi, Nursyirwan. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipasi Dalam Perspektif Teori Antropologi Pembangunan*. Dalam Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat local, Padang : Labor Antropologi Unand.
- ICSD Indonesia Center For Sustainable Development, 2004. *Pedoman Pengembangan Masyarakat (disektor energi dan sumber daya mineral)*
- Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Mentalitas dan Pem-bangunan*, Jakarta : PT. Gramedia
- _____, 2003. *Pengantar Antropologi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Manan, Imran. 1997. *Analisa Ekonomi Pembangunan Suatu Pengantar*. Padang : FKPS-IKIP
- Marzali, Amri. 2007. *Antropologi Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Moleong Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung :Tarsito

- Purwo santoso, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Poloma, Margaret M. 1992. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Rajawali
- Sidik, Prawiranegara A . 1994. *Kebijaksanaan Pembinaan Pengusaha Kecil Khususnya Tentang Organisasi Usaha di Indonesia Dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta :Gramedia
- Soedjatmoko, 1985. *Model Kebutuhan Dasar: Implikasinya dalam Kebijakan Nasional (dalam Dinamika Pembangunan Pedesaan)*, Disunting oleh : Faisal Kasryno dan Joseph Stepanek, Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi tentang "Struktur Masyarakat"*. Jakarta :CV. Rajawali
- Soemardjan, Selo, dan Soemardi, Soelaiman. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Y.P.F.E., Universitas Indonesia (U.I).
- Syarif, Syahrial.1991. *Industri Kecil dan Kesempatan Kerja*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Padang: Pusat Penelitian Unand.
- Suparlan, Parsudi. 1986. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Jakarta : CV Akademika Pressindo
- _____. 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- _____. 1994. *Masalah-Masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar Dalam Konsorsium Ilmu Sosial Dasar Antar Bidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Karunia
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Buku Pedoman PNPM Mandiri*, Sumber www.p2kp.org. Diakses 16 Januari 2009.19:15:20
- Taneko, Soleman B., 1984, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar*

Sosiologi Pembangunan, Jakarta : CV. Rajawali

Vredenberg. 1985. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia